

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan identik dengan kelaparan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kurangnya tempat tinggal, sakit namun tidak bisa ke Dokter, tidak tahu bahkan tidak mengenal huruf apalagi membaca, ketakutan akan tidak memiliki pekerjaan dan ketakutan akan masa depan di suatu waktu (Mardatila, 2021). Problematika kemiskinan di Indonesia memang merupakan hal yang belum usai hingga saat ini. Permasalahan tersebut umumnya banyak menjadi topik yang dibicarakan dari masa ke masa dan melalui banyak program-program yang dirasa dapat mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu permasalahan kompleks di mana bukan hanya karena masalah rendahnya pendapatan namun kemiskinan juga sangat berkaitan dengan rendahnya Pendidikan (Yuniarti, 2010).

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terjadinya mobilitas vertikal keatas dan juga sebagai sarana terpenting dalam meningkatkan posisi ekonomi (Ustama, 2009). Sebagai mana yang telah diketahui bersama, eksistensi Pendidikan telah banyak diketahui banyak orang namun, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang yang bisa mendapatkan pendidikan secara layak sesuai dengan maklumat yang tertulis dalam Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dimana dalam pasal tersebut dikatakan dengan jelas bahwa hak untuk mendapatkan Pendidikan adalah jaminan dari

pemerintah terhadap warga negaranya.

Banyak orang yang tidak dapat mengenyam Pendidikan karena masalah perekonomian dan banyak orang yang berada pada garis kemiskinan karena tidak dapat mengenyam Pendidikan sehingga antara Pendidikan dan juga kemiskinan membuat sebuah rantai yang tidak pernah terputus jika salah satu dari permasalahan tersebut tidak dapat dipecahkan. Permasalahan yang paling dini saat ini adalah relative mahal nya pembiayaan dalam Pendidikan sehingga tidak dapat dijangkau oleh golongan menengah kebawah yang tentunya membuat perputaran antara pendidikan rendah dan kemiskinan kian semakin sulit untuk diputus (Githa, 2020).

Di Indonesia terutama di kota besar seperti DKI Jakarta pun angka anak putus sekolah masih tergolong tinggi, pada tahun 2017 terdapat 3296 siswa usia SMA/SMK, 1080 siswa SMP dan juga 973 siswa Sekolah Dasar di Jakarta yang tidak melanjutkan Pendidikan. Di tahun 2018, angka tersebut meningkat sedikit menjadi 3420 siswa SMA/SMK, 1287 Siswa SMP dan 940 siswa SD dan Kembali turun ditahun 2019 menjadi 400 siswa SMA/SMK, 332 siswa SMP dan 305 siswa SD. Walaupun angka tersebut cukup tinggi, kenyataannya persentase putus sekolah di Jakarta masih berada pada rentang 0,5% (Jurnas, 2020).

Persoalan tentang pendidikan ternyata telah cukup lama menjadi prioritas yang diutamakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui beberapa

kebijakan oleh dinas sosial maupun dinas pendidikan yang telah ada sejak tahun 2006 dimana pada tahun tersebut proses pemerataan Pendidikan tertulis Perda no. 8 tahun 2006. Peraturan tersebut menyatakan bahwa usia sekolah terhitung dari umur 7 sampai dengan 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran formal melalui Pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Peraturan tersebut dipertegas melalui pasal yang terdapat dalam Perda tersebut yaitu pasal 16 huruf (f) yang menjelaskan bahwasannya pemerintah harus dan diwajibkan untuk mengeluarkan anggaran demi terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun bagi para siswa yang berada pada garis kemiskinan ataupun keluarga yang tidak dapat menjangkau pendidikan (Perda, 2008). Hal ini tentunya linear dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara memiliki hak dan diwajibkan untuk mendapatkan Pendidikan secara layak untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kebijakan tersebut diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui BBPP yang merupakan singkatan dari Bantuan Biaya Personal Pendidikan.

Pada tahun 2012, bantuan sebelumnya yang bernama BBPP berganti nama menjadi Kartu Jakarta Pintar atau yang biasa disebut dengan Kartu Jakarta Pintar Plus di mana program ini dirancang untuk memenuhi kewajiban pendidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi siswa miskin yang ada di wilayah DKI Jakarta (Oscar, 2012).

Pada tahun 2013, ketentuan dari bantuan tersebut diperbaharui melalui Pergub no 27 Tahun 2013 mengenai bantuan operasional

Pendidikan oleh gubernur DKI Jakarta yang bertugas pada saat itu yaitu Joko Widodo. Pada tahun 2019, Program tersebut berganti nama menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus melalui Pergub no. 15 tahun 2019 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus oleh gubernur bertugas Anies Baswedan. Siswa miskin yang menjadi sasaran dalam program ini adalah siswa yang dinyatakan tidak mampu berdasarkan penghasilan orang tua untuk memenuhi segala bentuk fasilitas pendidikan baik sepatu seragam transportasi dan juga biaya-biaya lainnya. Hal ini tentunya menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi para siswa di DKI Jakarta untuk mendapatkan fasilitas- fasilitas penunjang yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Pada awal terlaksananya program ini, Kartu Jakarta Pintar Plus bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh siswa tidak mampu melainkan telah menjangkau sampai kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus yaitu 28 peserta didik dengan tuna ganda, 1560 siswa dengan tuna grahita, 5 siswa penyandang tuna laras, 27 siswa tuna wicara, 642 siswa dengan tuna rungu, 33 penyandang tuna daksa, dan 47 peserta didik/siswa tuna netra (Laturiuw, 2019).

Dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar Plus ini tentu pemerintah mengharapkan pemerataan pendidikan dapat berjalan dengan baik serta dapat memutus rantai kemiskinan di DKI Jakarta sebab alasan biaya yang menyebabkan banyak warga DKI Jakarta tidak lanjut mengenyam Pendidikan hingga tuntas sudah bukan permasalahan utama lagi. Jika dilihat secara saksama tujuan dari program ini tentunya dapat memberikan motivasi belajar bagi siswa maupun siswi di lingkungan DKI

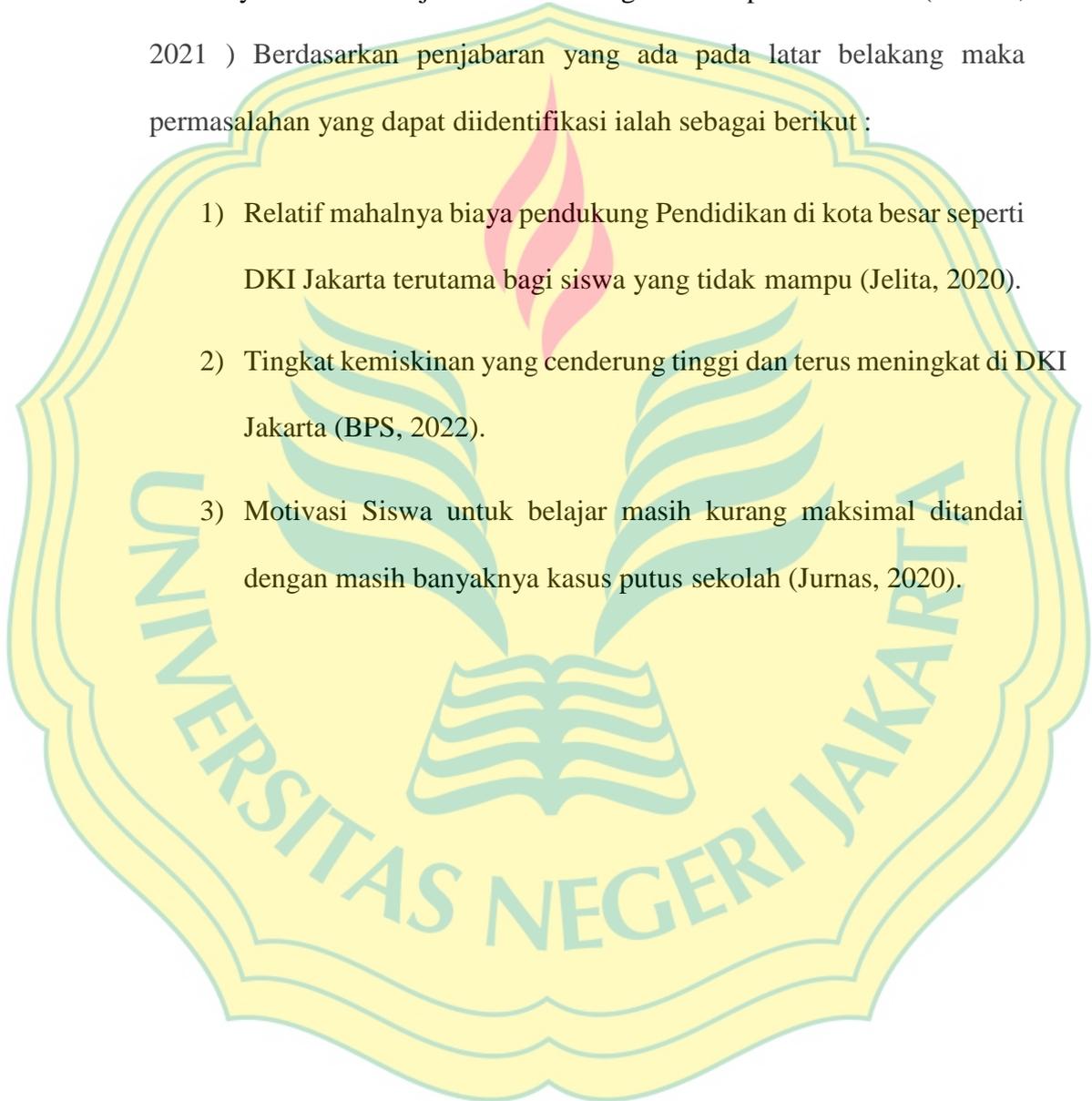
Jakarta yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat menikmati fasilitas lebih tanpa harus mengeluarkan anggaran pribadi. Menurut (Sardiman, 1986:75) motivasi khususnya dalam pembelajaran sendiri merupakan suatu dorongan yang bertindak sebagai penggerak dalam diri siswa agar memunculkan niat belajar yang mengarah pada kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang dikehendaki (Riadi, 2013). Dalam perwujudannya tentu motivasi belajar ini terdapat motif yang membuat subjek dapat terdorong untuk melakukan proses pembelajaran salah satunya dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus ini. Bukan tanpa alasan, motivasi terutama motivasi belajar sendiri memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan adanya dukungan sosial misalnya seperti beasiswa Kartu Jakarta Pintar Plus ini (Tentama, Subardjo, & Abdillah, 2019).

Salah satu sekolah dengan penerima program Kartu Jakarta Pintar Plus di DKI Jakarta adalah SMPN 242 Jakarta dengan 536 Siswa dimana 194 siswa diantaranya adalah siswa kelas 8. Dengan adanya program ini diharapkan siswa SMPN 242 Jakarta yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu atau masuk dalam kriteria miskin bisa terus mengenyam Pendidikan dengan baik tanpa harus mempersoalkan biaya dan juga keperluan lainnya terkait dengan Pendidikan dan pendukung lainnya. Berdasarkan pada latar belakang yang ada diatas tersebut, peneliti tertarik dan merasa harus melakukan penelitian berjudul : “Pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar Plus dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik (Studi Korelasional di SMPN 242 Jakarta)”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang umumnya memiliki tujuan untuk mengenalkan permasalahan. (Salmaa, 2021) Berdasarkan penjabaran yang ada pada latar belakang maka permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah sebagai berikut :

- 1) Relatif mahalnya biaya pendukung Pendidikan di kota besar seperti DKI Jakarta terutama bagi siswa yang tidak mampu (Jelita, 2020).
- 2) Tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi dan terus meningkat di DKI Jakarta (BPS, 2022).
- 3) Motivasi Siswa untuk belajar masih kurang maksimal ditandai dengan masih banyaknya kasus putus sekolah (Jurnas, 2020).



C. Pembatasan Masalah

Secara garis besar, penelitian ini hanya akan membahas mengenai Korelasi Kartu Jakarta Pintar Plus yang sebelumnya Bernama Kartu Jakarta Pintar dengan Motivasi Belajar peserta didik khususnya kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 242 Jakarta. Batasan Masalah ini memiliki tujuan membatasi penelitian agar terfokus dan lebih terarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: “Apakah terdapat korelasi antara Pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar Plus dengan Motivasi Belajar peserta didik kelas VIII di SMP Jakarta Selatan?”

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu salah satu hal yang diharapkan adalah manfaat penelitian tersebut. Sama halnya seperti penelitian lainnya, Penelitian inipun diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Manfaat penelitian ini yang paling pertama dan utama adalah untuk memperluas wawasan terutama dibidang Pendidikan. Selain itu, hasil ataupun temuan yang didapatkan dari penelitian ini tentunya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik di jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peserta didik

Bagi Siswa- Siswi Peserta didik penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar agar lebih termotivasi dalam mewujudkan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat

b. Bagi Pemerintah

Daerah khususnya wilayah Jakarta Selatan yang diharapkan dapat menjadi acuan mengenai keberhasilan program ini

c. Bagi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Bagi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya prodi PPKn yang diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan publik dan juga pengaruhnya bagi sesama

d. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti tentunya diharapkan bisa menambah wawasan baik secara teori maupun praktek saat terjun kelapangan sebagai bekal saat masuk ke dalam masyarakat.